

EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURAKARTA



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

DINI KUSUMAWARDANI
B 200 060 177

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era reformasi di Negara kita, begitu banyak tuntutan rakyat untuk memakmurkan daerah mereka. Kemandirian suatu daerah atau otonomi menjadi harapan yang sangat penting untuk perkembangan daerah itu sendiri. Pemerintah memberikan batasan atas otonomi tersebut dengan dibentuknya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, dimana pemerintah harus dapat mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dan melaksanakan pembangunan sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pemberian otonomi daerah, agar daerah dapat mampu menjalankan wewenang dari pusat secara baik. Dalam rangka meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah baik administrator pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa (Halim, 2004:141). Pemberian otonomi daerah kepada Provinsi dan Kabupaten atau Kota didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, bertanggung jawab merupakan angin segar yang disambut dengan positif oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah yang meliputi tugas pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. (Halim, 2004:105).

Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom adalah: Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan adanya otonomi daerah yang diperlukan dan bertanggung jawab, maka daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam bidang sarana dan prasarana fisik. Semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu upaya peningkatan sumber-sumber penerimaan harus lebih diperhatikan. Usaha untuk mengandalkan sumbangan dan bantuan pemerintah pusat atau tingkat pemerintahan yang lebih tinggi sudah tidak bias dipertahankan lagi di era otonomi. Berkaitan dalam pelaksanaan otonomi daerah maka kewenangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah yang memiliki wewenang yang luas dan kemampuan yang optimal untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber keuangannya sendiri. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi yaitu untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan dari daerah yang perlu ditingkatkan, sehingga kemandirian dan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat terlaksana (Halim, 2004:105). Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Pasal 79 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah meliputi : (1) sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) dana perimbangan; (3) pinjaman daerah serta (4) lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang digali dari daerah yang bersangkutan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah tersebut. Semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai dengan pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi kualitas ekonominya.

Suatu daerah melakukan pembangunan di segala aspek kehidupan baik fisik maupun non fisik, serta mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Agar dapat merealisasikan tujuan tersebut maka perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Perkembangan pembangunan yang semakin lama semakin pesat dalam kehidupan nasional memerlukan dukungan dari pemerintah dan seluruh potensi masyarakat. (Devas dkk, 1989:59).

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli yang membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dalam memantapkan ekonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan menitikberatkan pada tingkat kota atau kabupaten. Pajak daerah terdiri dari pajak daerah dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah yang pelaksanaannya didasarkan pada perundangan-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah diharapkan dapat memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah serta menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional dan transparan untuk mengoptimalisasi dan meningkatkan kontribusinya terhadap APBD. (Halim, 2004:142).

Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut undang-undang tersebut pajak daerah di bagi menjadi 2 bagian; (1) pajak propinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, biaya balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan; (2) pajak kabupaten atau kota : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan golongan C, dan pajak parkir. Dalam undang-undang tersebut ada yang di ubah yaitu, pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak hotel dan pajak restoran dijadikan satu, akan tetapi pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 pajak hotel dan pajak restoran di pisah.

Pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar nomor dua setelah Retribusi Daerah, hal ini dikarenakan jenis retribusi di Kota Surakarta lebih banyak dibandingkan jenis pajak daerah. Jumlah penerimaan Pajak daerah di Kota Surakarta relatif mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup banyak terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengadakan penelitian terhadap pajak daerah dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah dengan judul : diatas maka judul penelitian ini adalah “EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURAKARTA,Tahun 2006-2008”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta ?
2. Seberapa besar kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta ?
3. Bagaimana tingkat pencapaian target pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta ?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka penulis akan membatasi masalah target dan realisasi pendapatan daerah Kota Surakarta yaitu pajak daerah mulai tahun anggaran 2006 sampai dengan 2008.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tentang pajak daerah ini adalah :

1. Untuk mengevaluasi tingkat pertumbuhan pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta.
2. Untuk mengevaluasi kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta.
3. Untuk mengevaluasi tingkat pencapaian target pemungutan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tentang pajak daerah ini adalah :

1. Bagi penulis, peneliti diharapkan untuk menerapkan ilmu yang berkaitan dengan penelitian ini, menambah pengetahuan, pengalaman dalam memahami peranan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang berminat pada masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga kelemahan yang ada dalam penelitian ini dapat diperbaiki.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terbagi menjadi 5 bab, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan di bahas mengenai teori yang mendasari penelitian dan yang sudah ada dari peneliti-peneliti terdahulu sehingga berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan, meliputi pengertian pajak, pengertian pajak daerah, peran pendapatan asli daerah terhadap APBD, peraturan daerah tentang

pajak daerah, kontribusi, pertumbuhan, pencapaian target pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah serta penelitian terdahulu.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang hal-hal yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian, yang terdiri dari obyek penelitian, teknik pengumpulan data, data dan sumber data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA & PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang Gambaran Umum Kota Solo serta Analisis Data dan Pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.